

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI  
MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN  
PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Oleh

Bremahardika Dias Sadewa  
NIM. C71214068



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2018

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bremahardika Dias Sadewa  
NIM : C71214068  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan/ Prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga (AS)  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi  
Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012 Tentang  
Pencegahan Perkawinan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2018  
Saya yang menyatakan,



  
Bremahardika Dias Sadewa  
C71214068

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 301 K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN” yang ditulis oleh Bremahardika Dias Sadewa NIM C71214068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunafasahkan.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Pembimbing,



A. Kemal Riza, S.Ag. MA.

NIP. 197507012005011008

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bremahardika Dias Sadewa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



A. Kemal Riza, S.Ag, MA

NIP. 197507012005011008

Penguji II,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003

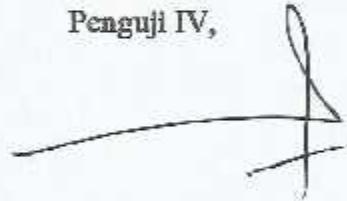
Penguji III,



H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si

NIP. 197311171998031003

Penguji IV,



Agus Solikin, M.S.I

NIP. 198608162015031003

Surabaya, 6 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [pcpus@uinsby.ac.id](mailto:pcpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Selbagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BREMAHARDIKA DIAS SADEWA  
NIM : C71214068  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [sadewadiaz@gmail.com](mailto:sadewadiaz@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 301

K/AG/2012 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis

( BREMAHARDIKA DIAS SADEWA )

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi kasus untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara No. 301 K/AG/2012 dan Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan Penetapan Kasasi Perkara No. 301/K/AG/2012. Kemudian penulis menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sehingga menolak permohonan Pemohon pencegahan perkawinan tersebut berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan antara lain *Pertama*; Pertimbangan hukum pencegahan perkawinan yang dilakukan orang tua dalam perkara No. 301 K/AG/2012 yang intinya dalam putusannya Majelis hakim memeriksa perkara menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun Pemohon tidak pernah bisa menguatkan dalilnya dengan bukti surat maupun saksi. Karena dalam hal ini beban Pembuktian ada pada pemohon, *Kedua*: analisis penulis terhadap pertimbangan Hakim dalam perkara No. 301.K/AG/2012 adalah tidak tepat mengingat hakim memeriksa perkara telah mengabaikan fakta hukum bahwa anak pemohon ketika memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan penetapan wali adhol masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga belum cakap hukum, akan tetapi pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012, dalam analisa penulis berdasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdara, maka pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara tersebut sudah tepat dalam menerapkan hukum sehingga dalam penetapannya permohonan pemohon ditolak. Mengingat pemohon dalam hal ini tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang dapat menguatkan dalil permohonannya.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, maka saran dari penulis dalam hal ini adalah Kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat lebih cermat dalam melihat alasan hukum para pemohon. Kepada pemohon hendaknya menyiapkan bukti-bukti untuk dapat menguatkan dalil permohonannya. Kepada calon mempelai untuk lebih memahami aturan-aturan yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang yang tentunya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan saran kepada mahasiswa fakultas syariah dan hukum jurusan hukum keluarga untuk bisa meneliti mengenai sengketa perkawinan lainnya seperti pembatalan perkawinan



## BAB II

# KAJIAN TEORI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN

### A. Perkawinan Dalam Perundang-Undangan

Indonesia ..... 19

## 1. Perkawinan Dalam Undang Undang No 1

**Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 19**

**2. Perkawinan dalam kompilasi hukum islam ..... 28**

**a. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ..... 33**

### B. Pencegahan Perkawinan Dalam perundang-

undangan di indonesia ..... 36

## 1. Pencegahan Perkawinan Dalam Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..... 36

## 2. Pencegahan Perkawinan Dalam Kompilasi

**Hukum Islam ..... 40**

### C. Hukum Acara Pembuktian Dalam Kitab

**Undang-Undang Hukum Acara Perdata ..... 47**

### BAB III

## PUTUSAN HAKIM PEMERIKSA PERKARA KASASI

### A. Kronologi Peristiwa Pencegahan Perkawinan

**Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung**  
**No.301 K/AG/2012 ..... 49**

**1. Kronologi Peristiwa ..... 49**

## 2. Alasan-Alasan Hukum Permohonan

**Pencegahan Perkawinan ..... 51**

**3. Putusan Hakim Di Tingkat Pertama ..... 54**

### B. Pertimbangan hakim dalam putusan kasasi

**mahkamah agung no. 301 K/AG/2012 ..... 57**





## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, Islam adalah agama sempurna yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita manusia sebagai umatnya. Ayat-ayat Al-qur'an yang Allah SWT turunkan kepada rasul melalui wahyu-Nya sebagai pedoman dan petunjuk jalan manusia menuju surga Allah dan petunjuk untuk keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>1</sup> Begitu halnya kesempurnaan ajaran-ajaran Islam yang mengatur masalah perkawinan. Di dalam ajaran Islam, perkawinan haruslah bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dunia dan akhirat di bawah ridha Allah SWT.

Perkawinan dalam ajaran Islam dipandang sebagai institusi yang sakral dan suci antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh untuk membentuk keluarga yang *Sakiyah Mawadah wa Rahmah*. Bahkan sebelum memulai perkawinan dalam Islam di ajarkan pula beberapa prasyarat agar seseorang mengetahui dengan benar hakikat sebuah

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Vorkik Van Hoeve, 1959), 105

perkawinan.<sup>2</sup> Hal ini tentunya ditujukan agar perkawinan yang berlangsung dapat menjadi perkawinan yang *Sakīyah mawaddah wa Rahmah*.

Adapun masalah perkawinan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki tujuan yang sama mengenai arti perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik. Namun perkawinan sendiri bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan, karena tidak dapat dipungkiri akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam sebuah perkawinan.<sup>3</sup> Berkaitan dengan hal ini tentunya membutuhkan kesiapan secara fisik, mental dan secara ekonomi agar perkawinan yang dijalani benar-benar mencapai tujuan sebagaimana dalam ajaran Islam yaitu *Sakinah mawaddah dan Rahmah*. Maka dari itu dalam undang-undang perkawinan juga mengatur mengenai batas umur seseorang dibolehkan menikah kecuali ada hal-hal yang menjadi pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batas usia perkawinan ini merupakan prasyarat yang masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Hal ini tidak lepas dari berbagai kasus perkawinan yang banyak disorot media massa bahkan menjadi perdebatan di kalangan tokoh-tokoh pemerhati anak, HAM, ulama, aktivis gender dan

<sup>2</sup> Najmuddin Zuhdi, *Studi Islam* 2, (Surakarta: Lpid, 2010), 104.

<sup>3</sup>Ibid, 107.



Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Peran negara sangatlah vital bagi terbangunnya institusi perkawinan yang mewujudkan pranata sosial yang sehat, harmonis, religius dan demokratis dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak kaum perempuan dan anak.<sup>7</sup>

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama tidak hanya di pedalaman, namun juga di kota besar. Arus globalisasi dan modernisasi yang melaju dengan kencang mengubah cara pandang dan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur yang saat ini sudah bukan lagi menjadi hal yang ditabukan. Ditambah lagi, saat ini ketika salah satu pihak yang akan melaksanakan perkawinan dalam posisi yang masih dibawah umur dapat

Dr. Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

[illegible]





[illegible]

Terhadap Putusan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby tersebut ayah dari mempelai perempuan merasa keberatan kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi. Di dalam kasasinya Pemohon Kasasi (Toriq Martak, SE Bin M Yuslam Martak) berpegang pada dalilnya bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Putusan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 22 Februari 2012 terdapat kesalahan yang menyolok dari majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam memutus perkara permohonan pencegahan perkawinan. Akan tetapi, permohonan Kasasi Pemohon ini juga ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Mahkamah Agung dalam Putusan No. 301 K/AG/2012.

## Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Perkawinan di bawah umur dalam peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini lebih terarah maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- lam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- timbangan hakim memeriksa perkara tingkat  
NO.301 K/AG/2012.
- s yuridis terhadap pertimbangan hakim d  
NO.301 K/AG/2012.
- Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian skripsi ini akan mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

Sejauh penelusuran penulis, pembahasan mengenai perkawinan sudah sangat banyak dilakukan dalam berbagai literatur baik berupa buku-buku, penelitian akademik, jurnal dan lainnya. Adapun dalam penelusuran penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

Adapun penelitian yang ditemukan penulis membahas masalah perkawinan anak dibawah umur, diantaranya adalah Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”, skripsi ini di tulis oleh Renny Retno Waty mahasiswi Jurusan Peradilan Agama fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<sup>9</sup> Ibid.

[illegible]



### E. Tujuan Penelitian

<sup>11</sup> Renny Retno Waty, “Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga, Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Tanjung Sari Kec. Cijeruk Bogor”, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, 80-81.

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara NO.301 K/AG/2012.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim dalam memutus perkara NO.301 K/AG/2012.

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan di atas maka kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).



perkawinan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>14</sup>

3. Kasasi Mahkamah Agung No. 301/K/AG/2012 Tentang Pencegahan Perkawinan : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang.<sup>15</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap data-data yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>16</sup> Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.<sup>17</sup> Yaitu data yang

<sup>14</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 150.

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/kasasi>, diakses tanggal 1 Juli 2018.

<sup>16</sup> Khudzaifah Dimyati, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Ums, 2004), 1.

<sup>17</sup> Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Doktrinal), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), 6.

Pada dasarnya, Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khas yakni sifatnya normatif.<sup>18</sup> Adapun dalam menjawab pokok permasalahan, karena mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum, maka tergolong sebagai suatu penelitian hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- <sup>18</sup> Philipus M Hadjon Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2005), 1-3.

[illegible]



untuk melihat bentuk undang-undangnya saja, akan tetapi juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, dasar filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari undang-undang tersebut. Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), sebagaimana diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam pendekatan kasus, hal yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Adapun *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil.<sup>20</sup> Dalam hal ini kasus yang dianalisis adalah pencegahan perkawinan oleh orang tua dalam perkara NO.301/K/AG/2012.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum *in- concreto*, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu, artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma/ yurisprudensi/ doktrin yang ada.<sup>21</sup> Sehingga dapat memberikan

<sup>20</sup>Ibid., 119-123.

<sup>21</sup> Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Pendekatan Doktrinal), 27.

Sumber data yang penulis gunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini menggunakan data sebagai berikut:

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa salinan Penetapan Kasasi Perkara NO. 301/K/AG/2012.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>22</sup>

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini diperlukan teknik penmgumpulan data melalui:

Dalam studi kepustakaan akan didapati konsepsi-konsepsi atau teori-teori, pandangan-pandangan atau penemuan-penemuan. Konsepsi tersebut dapat diperoleh dari mempelajari buku-buku literatur,

[illegible]

Skripsi ini terdiri empat bab yang disusun secara sistematis oleh penulis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan dibahas antara lain: Pengertian perkawinan, Hukum Perkawinan menurut Undang-undang Indonesia, hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam; Pengertian Pencegahan Perkawinan, pencegahan perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia, pencegahan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pembuktian dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Perdata.

[illegible]

pencegahan perkawinan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.301 K/AG/2012; alasan-alasan pencegahan perkawinan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO.301 K/AG/2012.

Bab IV Analisis Yuridis yang diterapkan hakim dalam putusan kasasi NO.301 K/AG/2012. Bab ini merupakan uraian dari jawaban terhadap rumusan masalah yang kedua. Bab ini akan membahas antara lain: analisis yuridis terhadap alasan hukum yang digunakan orangtua dalam mengajukan pencegahan perkawinan sebagaimana dalam putusan kasasi NO.301 K/AG/2012; analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi NO.301 K/AG/2012.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan dicantumkan pula saran dari penulis dengan harapan semoga penelitian yang penulis lakukan bermanfaat bagi semua pihak.

Peraturan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagi yang beragama Islam diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya perkawinan adalah kebutuhan dasar bagi manusia, yang antara lain adalah kebutuhan akan penyaluran hubungan seksual, kebutuhan akan mendapatkan keturunan dan kebutuhan akan kasih sayang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abraham H Maslow tentang tingkatan kebutuhan manusia sebagaimana dikutip oleh Tengku Erwinsyahbana, Maslow mengungkapkan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- [illegible]



- Kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan yang akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, kebutuhan jenis ini seperti kebutuhan akan merasa terlindungi, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas dan lainnya. Kebutuhan ini akan menjadi kebutuhan yang selalu meningkat dan jika tidak terpenuhi maka akan timbul rasa cemas, panik, takut, stress dan lainnya yang tentunya akan menghambat pada pemenuhan kebutuhan yang lainnya.
- Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan ini akan muncul jika kedua kebutuhan sebagaimana di atas telah terpenuhi. Kebutuhan ini akan muncul dengan cara orang mencari teman, kekasih, keturunan atau untuk menjadi bagian dari komunitas tertentu.
- Kebutuhan akan harga diri, kebutuhan ini terbagi menjadi dua yaitu *pertama*; kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi dan reputasi; *kedua*; kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian dan kebebasan.
- Kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi

satu sama lain dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan faktor potensial secara sempurna.

Jika dihubungkan dengan hirarki kebutuhan Maslow tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai kebutuhan untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang. Lebih dari itu perkawinan juga menjadi pemenuhan akan kebutuhan dalam tingkat yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang.<sup>24</sup>

Agar pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan dengan benar dan tertib maka diberlakukanlah hukum untuk mengaturnya yaitu hukum perkawinan. Adapun hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia secara umum adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan pengertian dari perkawinan, para pakar hukum memberikan pengertian sendiri-sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut R Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>25</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengertian ini mengandung suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman dari

<sup>24</sup>Ibid, 3.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23.

Dari ketiga pengertian sebagaimana diungkapkan oleh pakar hukum di atas, tersirat bahwa ada kesamaan pandangan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian tentang ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Perjanjian yang ada dalam perkawinan tentu berbeda maknanya dengan perjanjian sebagaimana dalam Bab III Kitab Hukum Perdata. Mengingat perjanjian dalam perkawinan adalah perjanjian untuk mewujudkannya kebahagiaan yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di antara kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan juga tidak dibatasi oleh waktu. Senada dengan yang diungkapkan oleh Ramulyo Idris bahwa tidak suatu merupakan perkawinan jika ikatan lahir dan batin antara kedua belah pihak tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1981), 7-8.  
<sup>27</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Ui Press, 1986), 47.  
<sup>28</sup> Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 44.

Diterbitkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebenarnya merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksud belum sesempurna yang diharapkan. Secara garis besar hal yang dicakup dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 diantaranya:

- (1) Dasar Perkawinan
- (2) Syarat Perkawinan
- (3) Pencegahan Perkawinan
- (4) Batalnya Perkawinan
- (5) Perjanjian Perkawinan
- (6) hak dan kewajiban Suami Istri
- (7) harta benda dalam perkawinan
- (8) putusnya perkawinan serta akibatnya
- (9) kedudukan anak
- (10) hak dan kewajiban anak dan orangtua
- (11) perwalian
- (12) pembuktian asal-usul anak
- (13) Perkawinan di luar Indonesia, dan
- (14) Perkawinan campuran.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, 10.

## 1) Syarat-syarat perkawinan

Dari pengertian perkawinan sebagaimana Pasal 1 undang-undang Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka implikasinya adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>31</sup> Selain itu tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1).

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dirinci dalam Bab II Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- (a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) harus mendapat izin orangtua
- (c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (d) Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat





- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus dan kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin.

[illegible]

## 2. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

## Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum perkawinan, Abul A mengungkapkan bahwa tujuan utama hukum hubungan suami istri adalah sebagai perlindungan d

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 11.

Pengertian perkawinan jika ditinjau dari segi bahasa merupakan terjemahan dari kata “nikah” yang dalam bahasa arab disebut dalam dua kata yaitu *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*.<sup>36</sup> Walaupun demikian, kata “*nikah*” lebih dikenal umum daripada kata *za-wa-ja*. Oleh karena itu rumusan kata nikah sama artinya dengan rumusan kata kawin. Sebagaimana pendapat Attabiq Ali dan Ahmad Zuhdi Muhhdlor dalam kamus komtemporer sebagaimana dikutip oleh Siti Dalilah Candrawati bahwa kata “nikah” mempunyai banyak arti yakni *al-dlam* (bergabung), *what'un* (hubungan kelamin) dan *'aqd* (ikatan).<sup>37</sup> Ketiga kata tersebut adalah kata-kata yang sering digunakan dalam menyebut pengertian perkawinan.

<sup>37</sup>Ibid.

Perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan titik pandang dari ulama-ulama tersebut. Akan tetapi perbedaan tersebut bisa saling melengkapi dalam kaitannya dengan pengertian nikah itu sendiri. Dari definisi nikah sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa hakekat perkawinan sebenarnya adalah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, yaitu

[illegible]

Ulama Syafiiyah secara rinci menegaskan bahwa hukum asal perkawinan itu dengan melihat kemampuan atau keadaan seseorang,

- Hukumnya Sunnah adalah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai kemampuan untuk segera menikah.
- Hukumnya makruh adalah bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula yang telah mempunyai perbekalan perkawinan akan tetapi ada cacat fisik atau seksual.

- Hukumnya wajib jika orang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin sementara dia juga takut akan terjerumus dalam perbuatan zina.

[illegible]



- Ulama lain menambahkan pendapat sebagai berikut:

- Demikian pendapat para ulama yang pada dasarnya ditentukan dari pandangan tentang kemampuan lahir batin seseorang untuk melakukan perkawinan.

### 1) Tujuan Perkawinan

- (a) Mendapatkan keturunan, Salah satu tujuan umat Islam melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.
- (b) Ketenangan hidup, Perlunya perkawinan bagi orang Islam salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup. Tujuan yang kedua dari perkawinan dalam hukum Islam adalah terciptanya kasih dan sayang di antara suami dan istri. Sebagaimana dikatakan oleh Abul A'la Maududi bahwa tujuan perkawinan dalam Islam ialah meletakkan hubungan manusia berlainan jenis itu di atas dasar cinta kasih sayang, agar kedua



Mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dirasa sudah saatnya ada perangkat hukum untuk melengkapi undang-undang perkawinan yang sudah ada khususnya untuk perkawinan umat Islam. Maka dari itulah diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian KHI digunakan secara efektif dalam penyelesaian perkara perkawinan umat Islam Indonesia di Peradilan Agama.

Adapun perkawinan dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>44</sup> Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 tahun 1954. Pencatatan perkawinan dalam hal ini sangat penting demi ketertiban di dalam masyarakat. Maka dari itu perkawinan yang sah harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>45</sup> Sehingga perkawinan yang tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka

<sup>45</sup>Ibid, Pasal 5 Ayat (1) Dan Ayat (2).

perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan Hukum.<sup>46</sup>

## B. Pencegahan Perkawinan dalam Perundang-undangan Indonesia

## 1. Pencegahan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

## Tentang Perkawinan

Secara umum pengertian pencegahan perkawinan adalah usaha untuk menghindari suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pencegahan dalam hal ini hanya bisa dilakukan ketika perkawinan itu belum berlangsung dikarenakan masih belum terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 Undang-undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*”.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Moch Isnaeni bahwa pencegahan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat jarang terjadi. Bahwa untuk melakukan pencegahan perkawinan dalam sebelum berlangsungnya perkawinan itu dengan alasan tertentu oleh pihak tertentu. Pencegahan ini bisa bersifat tetap dapat pula bersifat sementara bagi calon mempelai yang bersangkutan. Artinya jika

<sup>46</sup>Ibid, Pasal 6 Ayat (1) Dan Ayat (2).

Keberadaan norma pencegahan perkawinan ini memang diperlukan agar syarat-syarat perkawinan tetap dapat ditegakkan oleh segenap elemen masyarakat. Mengingat lembaga perkawinan ini merupakan sendi hakiki dari kehidupan sosial. Maka dari itu dihindarkannya sedini mungkin akan adanya pelanggaran aturan yang perkawinan akan menjadi suatu hal yang sangat berarti.<sup>48</sup>

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) ini.

<sup>47</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2016), 67.

[illegible]

*“barang siapakarena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, maka dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”.*

“(1) pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.”

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.



Pada Pasal 21 Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai

<sup>50</sup> Ibid., Pasal 20.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan di atas.

(5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin akan mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dengan demikian dalam uraian mengenai pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa pencegahan perkawinan adalah suatu upaya untuk menghindari berlangsungnya suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Pencegahan harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Pencegahan perkawinan juga dilakukan dengan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan di mana perkawinan yang akan berlangsung berkedudukan. Adapun pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah keluarga para pihak mempelai, orang yang masih terikat perkawinan dengan mempelai dan pejabat pencatat nikah.

Pada dasarnya perkawinan dapat dilangsungkan jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta sudah tidak ada lagi hal-hal yang

Masalah pencegahan perkawinan memang tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Menurut Amir Syarifudin, pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqih disebut dengan istilah *I'tiradh* yang berarti intervensi atau penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan masalah *kafaah* dan mahar. Karena masalah *kafaah* dan mahar merupakan harga diri dan gengsi dalam suatu keluarga. Pihak keluarga perempuan merasa gengsi atau akan jatuh harga dirinya jika anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak *se-kufu* atau status sosialnya lebih rendah. Begitu juga jika mahar yang diterima anak perempuan lebih rendah dari apa yang diterima oleh anggota yang lain akan merasa harga dirinya jatuh. Untuk menjaga harga diri inilah maka keluarga

[illegible]



Berkaitan dengan masalah pencegahan perkawinan ini KHI merincinya dalam aturan-aturan yang termuat dalam pasal-pasal nya. Walau demikian KHI dalam merumuskan pencegahan perkawinan secara langsung tidak merujuk kepada kitan fiqih manapun, karena memang dalam kitab-kitab fiqih tidak dibicarakan secara khusus. Materi mengenai pencegahan perkawinan yang dimuat dalam KHI hampir sama dengan rumusan pencegahan perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang Perkawinan walaupun ada beberapa tambahan dan rincian.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 61 sebagai berikut: "*tidak*

<sup>55</sup> Ibid, Pasal 60 Ayat (2)

*se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien”.*

Pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan diantaranya ialah.<sup>56</sup>

1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali, nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan oleh suami atau istri dari salah satu calon mempelai yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.<sup>57</sup> Di dalam KHI pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.<sup>58</sup> Mekanisme pencegahan perkawinan sebagaimana dirinci di dalam KHI adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dalam daerah hukum di mana perkawinan

<sup>56</sup> Ibid, Pasal 62 Ayat (1) Dan (2)

<sup>57</sup> Ibid., Pasal 63

<sup>58</sup>Ibid, Pasal 64.

akandilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat nikah.<sup>59</sup>

2. Pegawai pencatat Nikah kemudian akan memberitahukan tentang adanya permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>60</sup>
3. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.<sup>61</sup>
4. Permohonan pencegahan perkawinan bisa dicabut oleh pemohon atau dengan putusan Pengadilan Agama.
5. Pegawai pencatat nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun tidak ada permohonan pencegahan perkawinan.<sup>62</sup>
6. Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa dalam perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Ibid, Pasal 65 Ayat (1)

<sup>60</sup> Ibid, Pasal 65 Ayat (2)

<sup>61</sup>Ibid, Pasal 66.

<sup>62</sup>Ibid, Pasal 68.

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 69 Ayat (1)



Dari uraian mengenai pencegahan perkawinan baik yang ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI sama-sama menekankan pada kurangnya syarat perkawinan sehingga perlu dilakukan pencegahan perkawinan oleh pihak tertentu. Dari

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 69 Ayat (5)

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dalam persidangan perkara perdata ada alat bukti yang digunakan oleh Pemohon atau Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan atau permohonannya. Menurut Subekti, Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara yang berlaku.<sup>68</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu penyelesaian perkara perdata di pengadilan, acara pembuktian merupakan acara yang sangat penting. Karena dengan pembuktian inilah penggugat atau pemohon dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau menetapkan suatu perkara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1865 KUHPerdata “*setiap orang yang mendalilkan bahwa dia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”.

Dalam acara pembuktian ini tentunya alat bukti tidak kalah pentingnya dari acara pembuktian dalam persidangan suatu perkara. Alat

[illegible]

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi-saksi,
3. Persangkaan-persangkaan pengakuan;
4. Sumpah.

[illegible]



Berkaitan dengan batas usia perkawinan sebagaimana diuraikan tersebut hal ini sebagaimana terjadi pada perkara yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Perkara Nomor 301 K/AG/2012. Peristiwa ini bermula dari seorang anak perempuan yang berumur 16 tahun bernama Nisrin Binti Toriq Martaq yang akan menikah dengan Khalid Bin Chozi. Karena dianggap walinya enggan maka Nisrin Binti Toriq Martak mengajukan permohonan wali Adhlol kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor Perkara: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby pada tanggal 17 Juni 2011. Permohonan penetapan wali adhol ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis hakim Pemeriksa Perkara tersebut. Penetapan wali adhol oleh pengadilan agama Surabaya kemudian menjadi dasar bagi mempelai wanita tersebut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dengan wali hakim.

<sup>71</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak DiBawah Umur, Perspektif Fikih Islam, HAM International dan UU Nasional* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2011), 16.

Sayangnya, permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh pemohon tersebut ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Agama Surabaya. Merasa tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim, maka Toriq Martak, S.E Bin M. Yuslam Martak kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yang pada akhirnya juga kasasinya di tolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara tingkat kasasi dalam perkara No. 301 K/AG/2012.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permohonan pencegahan perkawinan ini adalah bahwa Pemohon dalam hal ini adalah selaku orangtua dan wali dari mempelai wanita. Pada saat mempelai wanita yang bernama Nisrin Binti Toriq Martak lahir pada tanggal 27 Juni 1994 mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan wali Adhol dari Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan register perkara No.573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011, usianya

Karena pemohon pengajuan penetapan wali adhol tersebut masih usia anak-anak maka ayahnya keberatan dengan alasan hukum sebagaimana disyaratkan pada Pasal 47 dan pasal 50 undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawina, bahwa anak tersebut belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya atau walinya dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di dalam dan di luar Pengadilan termasuk juga dalam hal pemberian kuasa sebagaimana terurai dalam permohonan Penetapan wali Adhol *a quo* kepada Pengadilan Agama Surabaya.

Alasan hukum lainnya adalah permohonan yang diajukan oleh anak Pemohon dalam rangka untuk melangsungkan perkawinan dengan Khalid Bin Chozi seperti tersebut dalam Penetapan *wali ahdol* menurut ayah kandung mempelai perempuan adalah patut dicegah



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, karena tidak memenuhi syarat-syarat menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan pencegahan perkawinan karena diketahui sebelum mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama Surabaya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan untuk meminta ijin nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Disisi lain Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya hingga sekarang belum pernah menerima surat permohonan ijin menikah tersebut dari anak Pemohon dan tidak pernah memberikan jawaban mengenai persetujuan atau penolakan apapun terhadap permohonan anak Pemohon untuk mendapatkan ijin nikah dari Pejabat Nikah yang berwenang. Padahal penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Semampir Kota Surabaya seharusnya menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh anak Pemohon sebelum mengajukan permohonan Penetapan wali Adhol kepada Pengadilan Agama Surabaya.

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas maka ayah mempelai perempuan yang berependapat bahwa karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas oleh anak Pemohon, maka pencegahan

Permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh ayah mempelai perempuan tersebut kemudian di putus oleh majelis hakim memeriksa perkara di Pengadilan Agama Surabaya yang pada intinya menolak permohonan permohon. Putusan majelis hakim memeriksa perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon

Pertimbangan lain dari mejelis hakim pemeriksa perkara bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon agar Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dan menyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan berlaku terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 27 Juli 2011. Akan tetapi di lain pihak mejelis hakim pemeriksa perkara telah memberi waktu yang cukup kepada pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya akan tetapi Pemohon tetap tidak bisa menunjukkan alat bukti surat berkaitan dengan adanya permohonan melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo

Pertimbangan majelis hakim memeriksa perkara dalam memutus juga berkaitan dengan masalah pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dan ternyata Permohonan Pemohon tidak didukung sama sekali oleh alat bukti baik surat maupun saksi terutama yang berkaitan dengan adanya Permohonan pelaksanaan perkawinan oleh anak Pemohon dan calon Pemohon dianggap tidak beralasan dan harus ditolak.

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

[illegible]

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 301 K/AG/2012.**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap penetapan Pengadilan Agama Surabaya yang dibacakan pada tanggal 22 Februari 2012 yang pada intinya menolak permohonan pemohon, maka Pemohon merasa keberatan terhadap penetapan tersebut. Pemohon kemudian pada tanggal 7 Maret 2012 dengan perantara kuasanya menyatakan kasasi secara lisan. Permohonan Kasasi secara lisan kemudian diiringi dengan diajukannya memori kasasi yang memuat alasan-alasannya dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Pada tanggal 21 Maret 2012.

[illegible]







pokoknya Pemohon tidak bisa menunjukkan alat bukti surat dan saksi yang berkaitan dengan adanya permohonan melangsungkan Perkawinan yang diajukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya, adalah tidak benar sama sekali karena Pemohon sudah berusaha menghadirkan saksi dari kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang diminta Majelis hakim Pemeriksa Permohonan Pemohon Kasasi baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya menolak kalau tidak ada panggilan resmi dari Pengadilan Agama Surabaya untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai saksi dalam perkara Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2012 tersebut.

Karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya meminta kepada Pemohon Kasasi agar Pengadilan Agama Surabaya memanggil secara resmi Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai saksi maka Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011 di ruang Persidangan, namun Majelis Hakim menolak dengan alasan sidang foluntair, selanjutnya Pemohon Kasasi mengajukan sekali lagi permohonan secara tertulis pada tanggal 3 Februari 2012 kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dan juga kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara Pemohon Kasasi No.

1220/Pdt.P/2011 tersebut (dalam pokok surat terlampir di dalam berkas perkara) namun surat Pemohon kasasi tersebut hanya dijawab oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Ketua Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang sedangkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tidak memberi jawaban dan selanjutnya dua minggu kemudian Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 di tolak Majelis Hakim.

Alasan pemohon juga terkait dengan Pertimbangan hukum Penetapan No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012 halaman 5, alinea 2 dan 3 Majelis Hakim di dalam memeriksa Permohonan Pemohon Kasasi No. 1220/Pdt.P/2011 tanggal 22 Februari 2012 tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dalam hukum acara. Karena seharusnya Majelis Hakim *a quo* memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti surat yang dianggap dasar Permohonan pencegahan Perkawinan dari Pemohon Kasasi dan bukannya Majelis Hakim meminta langsung kepada Pemohon Kasasi untuk membuktikan khusus yang menyangkut permohonan anak kandung pemohon Kasasi yang bernama Nisrin akan dinikahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya di Gedung IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tanggal 11 November 2011 atas dasar permohonan dari Kuasa hukum anak kandung pemohon kasasi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Oleh karena tersendat

(tertahan) dari kesaksian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang meminta Pengadilan Agama Surabaya memanggil secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. maka bukti-bukti lain dan saksi lainnya milik Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan di dalam persidangan, demikian pula Surat Pemohon Kasasi tanggal 3 Februari 2012 kepada Majelis Hakim yang dilampiri bukti-bukti juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan kasasi dengan melampirkan bukti-bukti tertulis kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara dan memutus Perkara Pemohon kasasi No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby.

Dari uraian tersebut Pemohon kasasi berpendapat bahwa *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum acara perdata mengenai kewenangan jabatan maka seharusnya sebagai Majelis *aquo* seharusnya dapat menggunakan kewenangannya secara *ex officio* atau (*olvendoende gemotiveerd*), karena jabatannya Majelis hakim pemeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. dapat memanggil kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya secara patut untuk hadir di persidangan permohonan pencegahan Perkawinan *a quo* dalam rangka untuk didengar keterangan sehubungan dengan Permohonan Kasasi untuk dicatatkan

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Kasasi diajukan agar Permohonan Pencegahan Perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 11 November 2011 dapat dikabulkan, karena bilamana penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011 PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011 yang dimohonkan oleh anak kandung pemohon Kasasi yang bernama Nisrin umur 16 Tahun melalui kuasa hukumnya dari IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut dibiarkan tanpa ada surat pembatalan/pencegahan dari Pengadilan Agama Surabaya maka penetapan Wali adhol no. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu oleh siapa saja yang memerlukan dan tidak ada jaminan surat penetapan No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 yang mana anak kandung Pemohon Kasasi bernama Nisrin akan dinikahkan oleh kantor Urusan Agama di Gedung Sunan Ampel Jalan Achmad Yani Surabaya atas permohonan 4 (empat) kuasa hukum Nisrin dengan dasar surat Penetapan Wali Adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 27 Juni 2011 yang amar Putusan Penetapan dalam poin 3 menyatakan: mengizinkan Pemohon (Nisrin Binti Thoriq Martak) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang



Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan dalam memori kasasi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara No. 301 K/AG/2012 dalam memberikan putusannya dilakukan dengan pertimbangan bahwa alasan ke 1 sampai ke 10 hakim menilai bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena Pemohon Asal/Pemohon Kasasi dalam BAP telah terbukti dan diberi kesempatan beberapa kali untuk membuktikan adanya permintaan melangsungkan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya (pendaftaran) tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhinya, dengan tidak adanya pembuktian tentang pendaftaran tersebut, maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya setempat menolak untuk memberikan keterangan tertulis

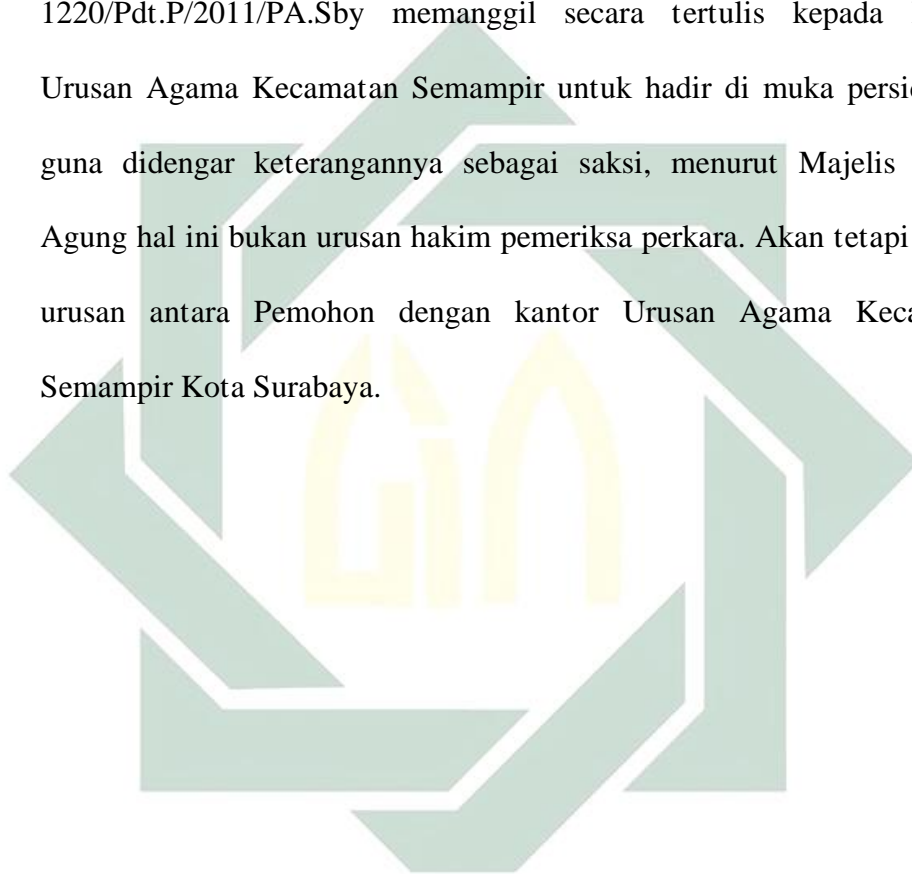
Majelis hakim memeriksa perkara menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009 maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang No. 48 tahun 2009, undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 5 tahun 2004



Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 oleh Prof. Dr.H Abdul Manan,S.H., SIP., M.Hum Hakim Agung yang ditetapkan oleh ketua Majelis Dr. Hamdan,S.H.,M.H dan Dr.H.Mukhtar Zamzani,S.H.,M.H, hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis beserta hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. H. Buang Yusuf,S.H.,M.H Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

[illegible]

Toriq Martak, SE Bin M. Yuslam Martak ditolak oleh Majelis. Putusan ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang tetap menilai bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Sementara permintaan Pemohon Kasasi agar Majelis Hakim memeriksa Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby memanggil secara tertulis kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir untuk hadir di muka persidangan guna didengar keterangannya sebagai saksi, menurut Majelis Hakim Agung hal ini bukan urusan hakim memeriksa perkara. Akan tetapi adalah urusan antara Pemohon dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.



Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kronologi dari diajukannya Permohonan Pencegahan Perkawinan yang dilakukan oleh Toriq Martak. SE bin M Yuslam Martak di Pengadilan Agama Surabaya dan kemudian diajukannya kasasi ke Pengadilan tinggi Agama Surabaya. Adapun analisis dalam bab ini penulis uraikan sebagai berikut:

Alasan hukum yang menjadi dasar permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak salah satunya adalah masalah kecakapan bertindak hukum. Dalam hal ini Anak Perempuan Pemohon pada saat mengajukan permohonan penetapan wali adhol masih berumur 16 (enam belas) tahun namun bisa memberikan kuasa kepada seorang advokat dari IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[illegible]

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Para istri, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang-orang yang dianggap belum dewasa (*mindejarig*) menurut ketentuan pasal 330 ayat (1) KUHPperdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Pada ayat (2) ditentukan pula bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi kedudukannya menjadi dewasa.<sup>74</sup>

Ketentuan mengenai orang-orang yang berada di bawah pengampunan dalam Pasal 433 KUHPerdara ada tiga alasan yaitu:

1. Keborosan (verkwisting).

<sup>74</sup>Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata



3. Jika perjanjian tersebut dibuat oleh perempuan yang bersuami, maka perjanjian tersebut akan batal sekedar perjanjian tersebut dibuat dengan melampaui kekuasaanya

5. Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut, yang kemudian dinyatakan batal, maka para pihak dalam perjanjian tersebut harus menempatkan perjanjian tersebut pada keadaan sebelum perjanjian dibuat, jadi perjanjian tersebut dianggap seolah-olah tidak ada.

Akan tetapi dalam praktik sehari-hari terutama dalam perjanjian penting banyak pihak masih memberlakukan ketentuan umur dewasa sebagaimana dalam ketentuan KUHPdata yaitu 21 tahun.

- Masalah kedewasaan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 98 sebagai berikut:

- Dari ketiga peraturan sebagaimana diuraikan di atas, jika dikaitkan Nisrin Binti Toriq Martak yang melakukan perbuatan hukum berupa memberi kuasa dan atau melakukan perjanjian kepada advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol di Pengadilan Agama Surabaya maka bisa ditinjau dari segi umur Nisrin pada saat melakukan perbuatan hukum. Pada saat melakukan perbuatan hukum berupa memberi kuasa dan atau melakukan perjanjian dengan advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol usia Nisrin Binti Toriq martak masih 16 tahun dan statusnya masih pelajar.



Sebagaimana dalam Pasal 300 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua biasanya dilakukan oleh bapak. Jika bapak berada dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orangtua, maka kekuasaan itu dilakukan oleh ibu.<sup>76</sup> Kekuasaan orangtua terhadap anak di sini meliputi kewajiban orangtua untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya.

---

i, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-um Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 153.

[illegible]

dalam kekuasaan orangtua tidak cakap untuk bertindak sendiri sehingga dirinya harus diwakili oleh orangtuanya.<sup>77</sup>

Akan tetapi sayangnya alasan hukum yang diajukan pemohon ini berkaitan dengan ketidakcakapan Nisrin Binti Martak untuk melakukan Perbuatan hukum tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun pada Permohonan di tingkat kasasi dengan Nomor Perkara 301.K/AG/ 2012. Sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dala poin 6 sebagai berikut:

Pemohon Kasasi/Pemohon dalam poin 6 sebagai berikut:

*“Bahwa hal ini Pemohon Kasasi dapat buktikan adanya klaim yang nyata dari majelis hakim pemeriksa perkara dalam menerbitkan Penetapan Wali adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby. tanggal 17 Juni 2011, karena majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya telah tidak meneliti kebenaran materiil Pemohon Wali Adhol No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby tanggal 17 Juni 2011 tersebut, khilafar yang nyata dari majelis hakim dapat dibuktikan dari: Anak kandung Pemohon Kasasi/Pemohon bernama Nisrin, pekerjaan Pemandu mengaku tanpa bukti menyatakan berumur 17 tahun memberikan surat kepada kepada kuasa hukumnya tanggal 15 Juni 2011 kepada Adhul dari Sunan Ampel Surabaya untuk mengajukan permohonan kasasi adhol di Pengadilan Agama Surabaya (Tanpa bukti pendukung).*

*luar maupun di dalam Pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 6, dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan menyatakan: setiap orang yang berumur kurang dari 18 tahun masih disebut anak yang masih dalam kandungan.”*

Pendapat majelis hakim Pemeriksa perkara sebagaimana diuraikan tersebut, dalam pandangan penulis hal ini amat disayangkan, karena kontradiktif antara ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di persidangan.

## 2. Analisis Tentang Pencegahan Perkawinan

Adapun analisis penulis tentang pencegahan perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah terkait dengan usia kawin sebagaimana ditentukan undang-undang tersebut. Hal ini sebagaimana dalam alasan yang kemukakan oleh Pemohon Pencegahan Perkawinan pada poin 9 yang mana Pemohon mengatakan sebagai berikut:

”bahwa dengan dicegahnya perkawinan yang akan terjadi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut adalah anak pemohon masih dalam usia wajib sekolah (belajar), tidak dapat mengontrol kejiwaanya dan calon suaminya tidak bekerja, sehingga demikian cukup alasan bagi Pengadilan a quo untuk mengabulkan permohonan pencegahan perkawinan dari Pemohon terhadap anak Pemohon tersebut”

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa Pemohon Kasasi yaitu Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak berpandangan bahwa permohonan pencegahan perkawinan yang diajukannya ke Pengadilan

Berdasarkan pasal tersebut, penulis berpandangan bahwa alasan hukum diajukannya pencegahan perkawinan oleh ayah kandung mempelai perempuan dalam hal ini sudah tepat. Mengingat dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 Ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mempelai yang belum berusia 21 tahun maka harus mendapat izin dari orangtuanya. Dalam hal ini Nisrin Binti Toriq Martak masih berusia 16 tahun dan sesuai ketentuan perundang-undangan jika dirinya akan melangsungkan perkawinan wajib mendapat izin dari orangtuanya.

[illegible]

Berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 secara hukum Pemohon memang ayah kandung dari mempelai wanita yang mana punya hak untuk melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 14 undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini Toriq Martak SE bin M Yuslam Martak adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yaitu Nisrin Binti Toriq Martak. Dengan demikian dalam analisa penulis dapat dikatakan bahwa selaku ayah kandung dan wali nasab yang sah dari mempelai perempuan, Pemohon mempunyai hak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut untuk melakukan permohonan pencegahan Perkawinan atas anak kandungnya ke Pengadilan Agama Surabaya.

[illegible]

Dengan demikian alasan hukum yang diajukan oleh ayah kandung mempelai perempuan untuk mencegah perkawinan anaknya dikarenakan belum cukup umur untuk kawin, dalam analisa penulis hal ini sudah tepat. Karena dalam hal ini mempelai perempuan masih berusia 16 tahun, sementara ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun wajib mendapat izin dari orangtuanya. Sementara dalam perkara ini orangtua mempelai perempuan nyata-nyata tidak mengizinkan anak perempuannya untuk menikah di usianya yang masih tergolong usia pelajar.

[illegible]



Dalam hal ini penulis berpendangan bahwa Pemohon yaitu Toriq martak SE Bin M Yuslam Martak berpandangan bahwa permohonan pencegahan perkawinan yang diajukanya ke Pengadilan Agama Surabaya sudah tepat yaitu ada kurang syarat umur yang ditentukan oleh undang-undang mengenai syarat minimal umur seseorang menikah. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan pada Pasal 15 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa pada perkawinan dimana calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang No 1 tahun 197 dan 62 ayat (1) dan ayat (2) KHI, dalam hal ini Toriq Martak SE bin M Yuslam Martak adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yaitu Nisrin Binti Toriq Martak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selaku ayah kandung dan wali nasab yang sah dari mempelai perempuan, Pemohon mempunyai hak sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut untuk melakukan permohonan pencegahan Perkawinan atas anak kandungnya ke Pengadilan Agama Surabaya.

Hakim dalam memutuskan setiap perkara tentunya m  
pertimbangan tersendiri. Akan tetapi hal ini juga tidak ter  
alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon. Sel  
dalam pertimbangan hakim pemeriksa perkara yang memutusk  
permohonan pencegahan perkawinan No. 1220/Pdt.P/2011/PA  
diajukan oleh pemohon Toriq martak SE Bin M Yuslam Ma

Dalam putusan di Pengadilan Agama Surabaya perkara permohonan pencegahan perkawinan dalam perkara Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby majelis hakim menolak permohonan dari Pemohon dengan pertimbangan hukum antara lain:

- Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Kasasi Nomor: 301 K/AG/2012 dalam Perkara Pencegahan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon masih sama, yaitu Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat kasasi yang berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun tidak pernah bisa membuktikan dengan alat bukti surat atau saksi untuk menguatkan dalilnya. Selain itu Majelis hakim pemeriksa perkara dalam tingkat kasasi juga berpendapat dalam pertimbangannya bahwa masalah pembuktian bahwa kantor urusan agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang menolak hadir sebagai

Dari pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dalam perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 dalam analisa Penulis masalah kecakapan hukum dari Nisrin Binti Toriq Martak untuk melakukan perbuatan hukum berupa memberikan kuasa kepada advokat dan atau melakukan perjanjian kepada advokat untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhol dalam Perkara No. 573/Pdt.P/2011/PA.Sby sama sekali tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Hal ini tentu sangat penulis sayangkan mengingat nyata-nyata anak yang belum cakap hukum bisa bertindak hukum namun majelis hakim Pemeriksa perkara baik di tingkat pengadilan Agama Surabaya maupun di tingkat Pengadilan tinggi Agama Jawa timur tidak mengindahkannya.

[illegible]

Berkaitan dengan masalah pembuktian tersebut penulis berpijak pada ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pembuktian adalah sangat penting dalam perkara perdata. Mengingat, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah yang menjadi dasar suatu perkara yang diajukan itu benar-benar ada atau tidak. Dari sinilah kemudian bisa dikatakan bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim memeriksa perkara tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara yang diajukan. Sebagaimana Pasal 164 HIR bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: (1) alat bukti surat (2) alat bukti saksi (3) Persangkaan (4) sumpah.

Berkaitan dengan perkara permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh Toriq Martak SE Bin M Yuslam Martak dalam perkara No. 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby maupun dalam perkara tingkat kasasi No. 301.K/AG/2012 pada kenyataannya Pemohon tidak dapat memberikan bukti surat dan bukti saksi. Bukti surat dalam hal ini adalah Surat penolakan dari KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya atau Formulir N 9. Kemudian Pemohon juga tidak dapat menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya sebagai pihak

Tidak adanya bukti yang diajukan oleh pemohon tentu ini bertentangan dengan ketentuan pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG/Pasal 1865 BW yang menentukan bahwa *“barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”*. Dengan demikian beban pembuktian ada pada pemohon seharusnya pemohon mampu mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil permohonannya di depan hakim pemeriksa Perkara. Pada kenyataanya Pemohon tidak dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan dalil permohonannya maka dengan itu hakim Pemeriksa perkara memberikan penetapan yang isinya menolak permohonan Pemohon. Hal ini menjadi resiko hukum bagi pemohon sebagaimana yang dikatakan oleh Sudikno Mertokusumo yang

[illegible]

Dengan demikian dalam analisa penulis, Majelis Hakim memeriksa perkara pada Perkara Permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan pemohon pada perkara Nomor: 1220/Pdt.P/2011/PA.Sby dan di tingkat kasasi perkara No. 301.K/AG/2012 yang mana dalam Penetapannya majelis hakim menolak permohonan Pemohon berdasarkan pertimbangannya adalah sudah tepat.

[illegible]



## PENUTUP

Adapun kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pencegahan perkawinan yang dilakukan orang tua dalam perkara No. 301 K/AG/2012 yang intinya dalam putusannya Majelis hakim memeriksa perkara menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon telah diberi waktu untuk membuktikan dalilnya namun Pemohon tidak pernah bisa menguatkan dalilnya dengan bukti surat maupun saksi. Karena dalam hal ini beban Pembuktian ada pada pemohon.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 301 K/AG/2012, dalam analisa penulis berpendapat tidak tepat, mengingat Hakim Pemeriksa perkara mengabaikan fakta hukum bahwa anak pemohon masih berusia 16 (enam belas tahun) ketika mengajukan permohonan wali adhol. Anak tersebut belum cakap hukum untuk memberikan kuasa kepada advokat untuk mengajukan wali adhol ke Pengadilan Agama Surabaya. Akan tetapi hal ini tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi No. 301.K/AG/2012. Sementara yang dijadikan pertimbangan hakim pemeriksa perkara sehingga permohonan pemohon ditolak, dalam hal ini Pemohon Kasasi

tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang dapat menguatkan dalil permohonannya.

## B. Saran

Berpijak pada kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada majelis hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat lebih cermat dalam melihat alasan hukum para pemohon.
2. Kepada pemohon hendaknya menyiapkan bukti-bukti untuk dapat menguatkan dalil permohonannya
3. Kepada calon mempelai untuk lebih memahami iaturan-aturan yang telah tercantum dalam ketentuan undang-undang yang tentunya ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.
4. Kepada mahasiswa fakultassyariah dan hukum jurusan hukum keluarga untuk bisa meneliti mengenai sengketa perkawinan lainnya seperti pembatalan perkawinan.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.

AbdulA'laMaududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terj. Achamad Rais, Jakarta : GemaInsani Press: 1994.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana: Jakarta,2007.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Cerita syekh puji dijabloskan ke penjara usai nikahi bocah 12 tahun, diakses dari: <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijabloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html>, padatanggal 28 Maret 2018, pukul 7.56 WIB.

Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Khudzaifah Dimyati, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Abadi, 2002.

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Mohd. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.

Najmuddin Zuhdi, *Studi Islam 2*, Surakarta: LPID, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011.

Philipus M Hadjondan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Di Indonesia , Jakarta: UI Press, 1986.

Susarsono, Hukum Perkawinan Nasional, cet III, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur, 1981.

[illegible]